

**PENGELOLAAN DINAS PERHUBUNGAN PADANG LAWAS UTARA
DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI PARKIR
DI KOTA GUNUNG TUA**

Abdul Rahmat^{1*)}, Tri Eva Juniasih², Wawan Patriansyah³

¹Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan, Indonesia

²Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan Indonesia

³Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan Indonesia

Email Korespondensi : abdulrahmat3257@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the management of parking retributions by the North Padang Lawas Regency Transportation Office in increasing parking retribution revenue in Gunung Tua City, identify the inhibiting and supporting factors, and describe the efforts made to increase said revenue. This research utilizes a qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the management of parking retributions has been implemented through management stages: planning, organizing, actuating, and controlling. Planning is carried out by setting targets and determining strategic parking locations; organizing through a clear division of tasks; actuating the collection still uses a manual system with tickets; and controlling is conducted through field monitoring and deposit inspections. However, the implementation is not yet optimal due to human resource limitations, weak supervision, a manual system prone to leakages, low public awareness, and a lack of supporting facilities and infrastructure. The supporting factors include a clear legal basis, an established organizational structure, strategic parking locations, and the commitment of the Transportation Office. Efforts made include the regulation and re-recording of parking data, officer guidance, increased supervision, public socialization, and planning for the improvement of the parking retribution collection system.

Key Word: *Parking Retribution, Management, Transportation Office, Regional Revenue.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Gunung Tua, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir telah dilaksanakan melalui tahapan manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan dengan penetapan target dan penentuan lokasi parkir strategis, pengorganisasian melalui pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan

pemungutan masih menggunakan sistem manual dengan karcis, serta pengawasan dilakukan melalui monitoring lapangan dan pemeriksaan setoran. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, sistem manual yang rawan kebocoran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Adapun faktor pendukung meliputi dasar hukum yang jelas, struktur organisasi yang sudah terbentuk, lokasi parkir yang strategis, dan komitmen Dinas Perhubungan. Upaya yang dilakukan meliputi penertiban dan pendataan ulang parkir, pembinaan petugas, peningkatan pengawasan, sosialisasi kepada masyarakat, serta perencanaan perbaikan sistem pemungutan retribusi parkir.

Kata Kunci: Retribusi Parkir, Pengelolaan, Dinas Perhubungan, Pendapatan Daerah.

I. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Salah satu implikasi penting dari otonomi daerah adalah tuntutan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. PAD menjadi indikator penting kemandirian daerah, karena semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Salah satu komponen PAD yang memiliki potensi cukup besar adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi parkir termasuk ke dalam jenis retribusi jasa umum, yang pemungutannya berkaitan langsung dengan pelayanan yang dirasakan

oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi parkir tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga harus memperhatikan aspek kualitas pelayanan publik.

Perkembangan wilayah perkotaan umumnya diikuti oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, perdagangan, dan mobilitas masyarakat. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan kebutuhan akan fasilitas parkir yang memadai. Kota Gunung Tua sebagai ibu kota Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa, sehingga memiliki intensitas lalu lintas dan aktivitas kendaraan yang relatif tinggi. Secara logis, tingginya aktivitas tersebut seharusnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan retribusi parkir. Namun, dalam praktiknya, potensi retribusi parkir di Kota Gunung Tua belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Padang Lawas Utara masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi riil yang ada. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem pengelolaan parkir, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa rendahnya penerimaan retribusi daerah sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi, kurangnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban

retribusi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan perparkiran, khususnya parkir di tepi jalan umum. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Perhubungan dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya sistem pengawasan di lapangan. Selain itu, masih ditemukannya praktik penarikan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan tarif resmi menunjukkan adanya potensi kebocoran penerimaan daerah.

Aspek kelembagaan dan manajerial juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan retribusi parkir. Menurut Nugroho (2017), keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pelaksana, kejelasan prosedur, serta konsistensi pengawasan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tujuan kebijakan sulit untuk dicapai secara optimal. Dalam konteks pengelolaan parkir, lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan, juru parkir, dan pihak terkait lainnya dapat berdampak pada rendahnya efektivitas pemungutan retribusi. Selain faktor internal pemerintah, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan retribusi parkir. Masyarakat sebagai pengguna jasa parkir sering kali belum memahami pentingnya membayar retribusi parkir sesuai ketentuan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah. Rendahnya kesadaran ini diperparah dengan minimnya sosialisasi kebijakan serta lemahnya penegakan aturan di lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo (2016)

yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Gunung Tua masih menghadapi berbagai permasalahan yang bersifat struktural, administratif, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian ilmiah yang mendalam mengenai bagaimana pengelolaan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Gunung Tua. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi eksisting, permasalahan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber PAD.

Penelitian ini didasarkan pada kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber PAD. Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi relatif stabil seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan aktivitas masyarakat. Apabila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, retribusi parkir dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

Selain itu, penelitian ini penting sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mengelola perparkiran. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan parkir yang lebih efektif, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sistem pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki

nilai praktis bagi pemerintah daerah serta nilai akademis dalam pengembangan kajian administrasi publik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis pengelolaan retribusi parkir di daerah kabupaten yang sedang berkembang, yaitu Kota Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada kota-kota besar, penelitian ini menyoroti dinamika pengelolaan parkir pada daerah dengan keterbatasan sumber daya dan karakteristik sosial yang berbeda. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis manajerial, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam satu kerangka kajian. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru mengenai pengelolaan retribusi parkir yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di beberapa ruas jalan dan pusat aktivitas ekonomi di Kota Gunung Tua, ditemukan bahwa sistem pengelolaan parkir masih didominasi oleh mekanisme manual. Juru parkir umumnya menarik retribusi secara langsung kepada pengguna jasa parkir tanpa disertai pemberian karcis resmi. Kondisi ini membuka peluang terjadinya kebocoran penerimaan dan menyulitkan proses pengawasan.

Selain itu, pengawasan dari Dinas Perhubungan terhadap aktivitas perparkiran di lapangan dinilai belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi serta penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, tingkat kesadaran masyarakat untuk meminta karcis parkir dan membayar retribusi sesuai aturan masih relatif rendah. Hasil observasi

awal ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan retribusi parkir di Kota Gunung Tua bersifat kompleks dan melibatkan berbagai aktor. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan agar potensi retribusi parkir dapat dimanfaatkan secara optimal.

II. Administrasi Publik

2.1 Defenisi Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan salah satu cabang ilmu administrasi yang berfokus pada proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas birokrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pengelolaan sumber daya publik guna mencapai tujuan negara. Menurut Dwight Waldo (1971), administrasi publik adalah manajemen dan organisasi manusia serta sumber daya material untuk mencapai tujuan pemerintahan. Pandangan ini menekankan bahwa administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan, tetapi juga menyangkut nilai, tujuan, dan kepentingan publik yang ingin dicapai oleh negara.

Di Indonesia, Thoha (2012) menyatakan bahwa administrasi publik adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Definisi ini memperlihatkan bahwa administrasi publik tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mencakup tahapan perencanaan hingga evaluasi. Selanjutnya, menurut Pasolong (2013), administrasi publik merupakan kerja sama sekelompok orang dalam organisasi pemerintahan untuk

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan negara. Pandangan ini menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagai wujud profesionalisme aparatur negara. Dwiyanto (2015) menambahkan bahwa administrasi publik berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, administrasi publik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas birokrasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa administrasi publik mencakup aspek pengelolaan organisasi pemerintahan, pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan kepada masyarakat, serta pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan secara sistematis dan bertanggung jawab.

2.1.1 Peran Administrasi Negara dalam Penyusunan Kebijakan Publik

Peran administrasi negara dalam penyusunan kebijakan publik sangat penting karena administrasi negara menjadi jembatan antara proses politik dan pelaksanaan teknis kebijakan. Administrasi negara tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan melalui penyediaan data, analisis masalah, serta rekomendasi kebijakan kepada para pengambil keputusan. Menurut Dunn (2018), kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik, dan administrasi negara berperan sebagai aktor utama dalam

menyediakan informasi, alternatif kebijakan, serta evaluasi dampak kebijakan. Dengan demikian, administrasi negara berfungsi sebagai sumber keahlian teknis (*technical expertise*) yang sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan kebijakan.

Winarno (2012) menyatakan bahwa administrasi negara memiliki peran strategis dalam proses kebijakan publik, terutama pada tahap perumusan dan implementasi kebijakan. Aparatur administrasi negara bertugas mengidentifikasi masalah publik, menyusun agenda kebijakan, serta menyiapkan rancangan kebijakan yang realistis dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang baik sangat bergantung pada kualitas administrasi negara. Selanjutnya, menurut Anderson (2015), administrasi negara terlibat dalam hampir seluruh tahapan kebijakan publik, mulai dari perumusan masalah, formulasi kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Aparatur pemerintah sebagai bagian dari administrasi negara berperan dalam memberikan masukan kebijakan berdasarkan pengalaman praktis dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat. Thoha (2012) menjelaskan bahwa administrasi negara berperan sebagai pelaksana sekaligus perumus kebijakan publik, karena birokrasi pemerintah memiliki kewenangan administratif dan teknis dalam menyusun rancangan kebijakan yang akan ditetapkan oleh pimpinan politik. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi tidak bersifat pasif, tetapi aktif dalam proses kebijakan publik. Dengan demikian, administrasi negara berperan dalam:

- a. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah publik.

- b. Menyediakan data dan informasi sebagai dasar kebijakan.
- c. Menyusun alternatif kebijakan dan rekomendasi.
- d. Menjamin kebijakan dapat dilaksanakan secara administratif.
- e. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan.

Peran tersebut menjadikan administrasi negara sebagai aktor kunci dalam menjamin kebijakan publik bersifat rasional, implementatif, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

2.1.2 Fungsi dan Prinsip Administrasi Negara

Fungsi dan prinsip administrasi negara merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan secara efektif, efisien, serta bertanggung jawab. Administrasi negara tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai sistem yang mengatur bagaimana kebijakan direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sesuai dengan tujuan negara dan kepentingan publik.

Menurut Gulick dan Urwick (1937), fungsi administrasi negara dikenal dengan konsep POSDCORB, yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (penyusunan pegawai), *Directing* (pengarahan), *Coordinating* (pengkoordinasian), *Reporting* (pelaporan), dan *Budgeting* (penganggaran). Konsep ini menunjukkan bahwa administrasi negara mencakup rangkaian kegiatan yang sistematis, mulai

dari perencanaan hingga pengawasan keuangan, guna memastikan roda pemerintahan berjalan secara teratur. Selanjutnya, menurut Siagian (2001), fungsi utama administrasi negara meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Perencanaan berfungsi untuk menetapkan tujuan dan strategi, pengorganisasian bertujuan membagi tugas dan wewenang secara jelas, penggerakan berkaitan dengan upaya memotivasi aparatur agar bekerja optimal, sedangkan pengawasan berfungsi memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Selain fungsi, administrasi negara juga berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman etika dan operasional. Menurut UNDP (2009), prinsip utama administrasi negara yang baik tercermin dalam konsep *good governance*, yaitu meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa administrasi negara tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Dengan menerapkan fungsi dan prinsip administrasi negara secara seimbang, penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara tertib, bertanggung jawab, serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.3 Pengelolaan

2.3.1 Definisi Pengelolaan

Pengelolaan merupakan konsep yang sangat penting dalam administrasi negara maupun manajemen organisasi, karena menjadi dasar dalam mengatur dan

mengarahkan sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan teknis, tetapi juga sebagai proses sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Menurut Siagian (2001), pengelolaan adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Definisi ini menekankan bahwa pengelolaan tidak dapat dipisahkan dari kerja sama dan koordinasi antarindividu dalam suatu organisasi.

Selanjutnya, menurut Terry (2012), pengelolaan merupakan suatu proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Definisi ini menegaskan bahwa pengelolaan bersifat prosedural dan berkesinambungan.

Dalam konteks organisasi pemerintahan, pengelolaan memiliki makna yang lebih luas karena berkaitan dengan kepentingan publik. Pengelolaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengelolaan tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum. Berdasarkan berbagai pendapat ahli tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan merupakan suatu proses terpadu yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya organisasi, baik manusia maupun non-manusia, untuk mencapai tujuan secara

efektif dan efisien.

2.3.2 Komponen Utama Pengelolaan

Pengelolaan (*management*) merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa komponen atau fungsi utama yang saling berkaitan satu sama lain.

Berdasarkan berbagai pendapat, komponen utama pengelolaan pada umumnya mencakup:

- a. Perencanaan (*planning*),
- b. Pengorganisasian (*organizing*),
- c. Pelaksanaan atau pengarahan (*actuating/directing*),
- d. Pengawasan atau pengendalian (*controlling*).

2.4 Hubungan Administrasi Negara dengan Pengelolaan Parkir

Administrasi negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengelolaan parkir, karena parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik sekaligus sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi. Pengelolaan parkir tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi kebijakan publik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan parkir harus didasarkan pada prinsip-prinsip administrasi negara, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta akuntabilitas.

Thoha (2012) menjelaskan bahwa administrasi negara merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup perumusan, pelaksanaan, dan

evaluasi kebijakan publik. Pengelolaan parkir menjadi salah satu wujud konkret dari pelaksanaan kebijakan publik di bidang transportasi dan perhubungan, sehingga keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas administrasi negara yang dijalankan.

Dalam pengelolaan parkir, hal ini berarti pemerintah harus memastikan adanya pelayanan parkir yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus menjamin bahwa retribusi parkir dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.5 Restribusi

Retribusi merupakan salah satu instrumen penting dalam keuangan daerah yang digunakan pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, retribusi memiliki karakteristik berbeda dengan pajak, karena retribusi berkaitan langsung dengan adanya balas jasa dari pemerintah kepada wajib retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan retribusi daerah sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Definisi ini menjadi landasan yuridis dalam pemungutan retribusi di Indonesia.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dipahami bahwa retribusi

memiliki beberapa unsur pokok, yaitu adanya pelayanan atau izin dari pemerintah daerah, adanya pembayaran dari masyarakat, adanya manfaat langsung yang diterima, serta adanya dasar hukum yang mengatur pemungutannya. Dalam konteks penelitian mengenai retribusi parkir, retribusi dipahami sebagai pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas pemanfaatan fasilitas parkir yang disediakan atau diatur oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan retribusi parkir sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan parkir, sistem pemungutan yang tertib, serta pengawasan yang efektif.

2.5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi, khususnya retribusi parkir, berkaitan erat dengan aspek manajerial, teknis operasional, regulasi, serta perilaku masyarakat sebagai pengguna jasa. Tinggi rendahnya penerimaan retribusi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya objek retribusi, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan.

- a. Faktor regulasi dan kebijakan daerah.
- b. Faktor kualitas pelayanan parkir.
- c. Faktor jumlah dan aktivitas kendaraan.
- d. Faktor kinerja dan integritas petugas parkir.
- e. Faktor sistem dan mekanisme pemungutan.

f. Faktor pengawasan dan pengendalian.

g. Faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

III. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur logika hubungan antara peran Administrasi Negara, Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan, dan peningkatan Retribusi Parkir di Kota Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara. Secara konseptual, Administrasi Negara menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pengelolaan parkir karena di dalamnya terdapat prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dinas Perhubungan sebagai organisasi perangkat daerah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik di bidang perhubungan, termasuk pengelolaan parkir dan pemungutan retribusinya. Keberhasilan pengelolaan parkir sangat ditentukan oleh bagaimana fungsi-fungsi administrasi negara tersebut diterapkan secara efektif.

Pengelolaan parkir yang baik harus memenuhi komponen pengelolaan, yaitu:

- a. Perencanaan (*planning*): penetapan lokasi parkir, target penerimaan retribusi, serta strategi peningkatan pendapatan.
- b. Pengorganisasian (*organizing*): pengaturan struktur organisasi, pembagian tugas petugas parkir, dan sistem kerja.
- c. Pelaksanaan (*actuating*): pelaksanaan pemungutan retribusi parkir sesuai aturan dan tarif yang berlaku.
- d. Pengawasan (*controlling*): pengawasan terhadap petugas parkir, sistem setoran, dan

pencatatan hasil retribusi.

Jika keempat komponen ini berjalan dengan baik, maka akan tercipta pengelolaan parkir yang tertib, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan parkir yang efektif akan berdampak langsung pada meningkatnya retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Administrasi Negara memberikan prinsip dan sistem kerja.
- b. Dinas Perhubungan bertindak sebagai pelaksana pengelolaan parkir.
- c. Pengelolaan parkir yang efektif dan efisien menjadi variabel penghubung.
- d. Retribusi parkir sebagai output yang diharapkan meningkat.

IV. Metode Penelitian

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif proses pengelolaan retribusi parkir yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Padang Lawas Utara dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Gunung Tua. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara langsung dari subjek penelitian mengenai kebijakan, strategi, mekanisme, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi parkir.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi parkir. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memaparkan dan menganalisis kondisi nyata yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Dinas Perhubungan Padang Lawas Utara, efektivitas sistem pemungutan retribusi parkir, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan penerimaan retribusi parkir di Kota Gunung Tua.

4.2 Subjek atau Informan dan Objek Penelitian

Subjek penelitian (informan) adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengelolaan retribusi parkir di Kota Gunung Tua. Penentuan subjek penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, komprehensif, serta relevan dengan fokus penelitian. Adapun subjek penelitian meliputi:

- a. Kepala Dinas Perhubungan Padang Lawas Utara, sebagai penanggung jawab utama dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pengawasan pengelolaan retribusi parkir.
- b. Kepala bidang atau kepala seksi yang membidangi perparkiran, sebagai pelaksana teknis yang mengoordinasikan kegiatan operasional pengelolaan parkir, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemungutan retribusi parkir.
- c. Petugas parkir, sebagai pelaksana

langsung di lapangan yang berperan dalam pemungutan retribusi parkir dari masyarakat serta pemberian pelayanan parkir.

- d. Pihak terkait lainnya yang dianggap relevan, seperti bendahara penerimaan, aparat pengawas internal, atau instansi pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan retribusi parkir.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kemampuan informan dalam memberikan informasi yang akurat, relevan, dan mendalam terkait pengelolaan retribusi parkir di Kota Gunung Tua. Melalui teknik *purposive sampling*, peneliti memilih informan yang benar-benar memahami dan terlibat langsung dalam proses pengelolaan retribusi parkir, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Informan dipilih bukan berdasarkan jumlah, melainkan berdasarkan kualitas informasi yang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Objek penelitian adalah pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Padang Lawas Utara dalam upaya meningkatkan retribusi parkir di Kota Gunung Tua. Pengelolaan parkir yang dimaksud meliputi seluruh proses dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi pemungutan retribusi parkir. Fokus objek penelitian ini diarahkan pada bagaimana sistem pengelolaan parkir dijalankan,

sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir, serta kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Padang Lawas Utara.

4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan mendalam mengenai pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Padang Lawas Utara dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Gunung Tua. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

4.4 Teknik Analisis Data

V. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Gunung Tua, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih menggunakan sistem manual, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan di lapangan.

- b. Faktor penghambat utama dalam peningkatan retribusi parkir adalah keterbatasan jumlah petugas dan pengawas, rendahnya kedisiplinan dalam penggunaan karcis, serta kurangnya kesadaran masyarakat, sedangkan faktor pendukungnya meliputi adanya dasar hukum yang jelas, struktur organisasi yang sudah terbentuk, dan potensi lokasi parkir yang strategis.
- c. Upaya Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir telah dilakukan melalui penertiban dan pendataan lokasi parkir, pembinaan petugas, peningkatan pengawasan, serta sosialisasi kepada masyarakat, namun masih diperlukan penguatan sistem pemungutan yang lebih transparan dan terintegrasi agar penerimaan retribusi parkir dapat meningkat secara optimal.

VI. Daftar Pustaka

- Aguinis, H. (2019). *Performance management* (4th ed.). Chicago: Chicago Business Press.
- Armstrong, M. (2014). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice* (13th ed.). London: Kogan Page.
- Arfian Nur Rohmat, M., Indaryani, M., & Sutono. (2023). Pengaruh mutasi, teknologi informasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui komitmen organisasi. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.

- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Bernardin, H. J., & Russell, J. E. A. (2013). *Human resource management: An experiential approach* (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1997). Task performance and contextual performance: The meaning for personnel selection research. *Human Performance*, 10(2), 99–109.
- Cascio, W. F. (2013). *Managing human resources: Productivity, quality of work life, profits* (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Dessler, G. (2017). *Human Resource Management* (15th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Davis, K., & Newstrom, J. W. (2002). *Organizational behavior: Human behavior at work* (11th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Flippo, E. B. (2001). *Personnel management* (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2012). *Organizations: Behavior, structure, processes* (14th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Handoko, T. H. (2014). *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959). *The motivation to work*. New York: John Wiley & Sons.
- Ivancevich, J. M. (2013). *Human Resource Management* (12th ed.). McGrawHill Education. Koopmans, L., Bernaards, C. M., Hildebrandt, V. H., van Buuren, S., van der Beek, A. J., & de
- Vet, H. C. W. (2011). Conceptual frameworks of individual work performance: A systematic review. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 53(8), 856–866.
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). *A theory of goal setting and task performance*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Luthans, F. (2011). *Organizational behavior: An evidence-based approach* (12th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Maulida, R., Raihan, R., & Musrizal. (2024). Pengaruh mutasi kerja, beban kerja dan konflik kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(2), 45–56.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*,

- 50(4), 370–396. Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2011). *Human Resource Management* (13th ed.). Mason, OH: Cengage Learning.
- Miner, J. B. (2005). *Organizational behavior 1: Essential theories of motivation and leadership*. New York: M.E. Sharpe.
- Mondy, R. W., & Martocchio, J. J. (2016). *Human resource management* (14th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Nitisemito, A. S. (2010). *Manajemen personalia: Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2016). *Human resource management: Gaining a competitive advantage* (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Nugroho, R. (2019). Pengaruh mutasi dan penempatan kerja terhadap kinerja pegawai. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 98–109.
- Pratama, A. (2021). Pengaruh mutasi dan promosi jabatan terhadap kinerja pegawai. *Jurnal Manajemen Publik*, 8(2), 115–124.
- Rivai, V., & Sagala, E. J. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior* (18th ed.). Pearson Education.
- Sari, N., & Putra, D. (2020). Pengaruh mutasi pegawai terhadap kinerja pegawai pada instansi pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 45–56.
- Sari, R., & Wijayanti, D. (2018). Pengaruh mutasi pegawai terhadap kinerja pegawai di instansi pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 45–54. Schermhorn, J. R., Hunt, J. G., Osborn, R. N., & Uhl-Bien, M. (2011). *Organizational behavior* (11th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2014). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Simamora, H. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: STIE YKPN Press. Sinambela, L. P. (2012). *Kinerja pegawai: Teori, pengukuran, dan implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Tjiptono, F. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Torrington, D., Hall, L., Taylor, S., & Atkinson, C. (2020). *Human resource management* (11th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Vroom, V. H. (1964). *Work and motivation*. New York: John Wiley & Sons. Wibowo. (2018). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulkifli, Z., & Heliyani, H. (2024).

Pengaruh kepemimpinan,
remunerasi dan mutasi terhadap
kinerja pegawai.